

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdurahman, Muhdar. 2018. *Sistem informasi pengolahan data balita, berbasis website pada kantor UPT-KB KEC Ternate Selatan*. Vol 3 No 2.
- B, Marshall Romney, dan Steinbart, Paul J. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan, Buku Satu*, diterjemahkan: Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari. Salemba Empat, Jakarta.
- Haryono, Jusup. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi Keenam*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, H.M. 2005. *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. ANDI, Yogyakarta.
- Soemarso. 2018. *Akuntansi Suatu Pengantar (5 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Turner, L., Weickgenannt, A., & Copeland, M. K. 2017. *Accounting Information. Systems Controls and Processes Third Edition*. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc.
- Yuliana, Khozin, Muhamad Zahrudin dan Tri Utari. 2018. *Analisa sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan pada SMA Nusantara 1 Tangerang*. Vol 4 No 1.
- Warren, S.Carl. et al. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 263/PMK.01/2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 76/PMK.06/2019;

Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Prosedur Pengurusan Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KM.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.